

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Proses komunikasi pemerintah dalam relokasi PKL kawasan alun-alun Purworejo ini dikatakan berhasil. Dengan menganalisis menggunakan teori Lasswel proses komunikasi dengan berkoordinasi antara komunikator dengan komunikan dikatakan komunikatif. Meskipun dalam prosesnya mengalami sebuah kendala/ masalah. Namun pemerintah menggunakan media/saluran yang mampu menghilangkan kendala tersebut. Proses komunikasi yang berhasil ini dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1. Komunikator dalam relokasi PKL kawasan alun-alun Purworejo adalah tim khusus yang diketuai oleh Dinas koperasi, UKM dan Perdagangan, dan diwakilkan oleh satpol PP dan anggota lembaga/dinas pendukung mampu berkoordinasi dengan baik. Sehingga proses tersebut mempermudah pelaksanaan kebijakan terkait relokasi PKL ke romansa kuliner.
2. Pesan yang disampaikan pemerintah yaitu dengan cara *face to face* bertemu langsung dengan PKL di lokasi dan melalui sosialisasi/ diskusi bersama di tempat Pendopo Purworejo. Pesan yang disampaikan oleh tim khusus berisi pemahaman terkait dengan penataan kota. Penyampaian pesan ini dilakukan tidak hanya sekali atau dua kali namun berkali-kali secara formal dan nonformal.

3. Media yang digunakan dalam proses komunikasi terkait relokasi PKL dengan menggunakan tiga media yaitu cetak , visual dan audiovisual. Media cetak melalui surat edaran, visual melalui spanduk dan audio visul melalui youtube. media tersebut mampu memberikan informasi terhadap PKL dan masyarakat.
4. Komunikasi dalam relokasi ini adalah PKL dan masyarakat. Pihak dari PKL akhirnya mau direlokasi ke romansa kuliner Purworejo. Sebab proses yang dilakukan pemerintah ini mampu mengubah perilaku dan kondisi secara bertahap.
5. *Feedback/* umpan balik dari proses komunikasi adalah positif dan negatif. 40% PKL menolak adanya relokasi ini dan melakukan demonstrasi. Namun dengan pendekatan yang dilakukan pemerintah selama satu tahun kurang ini mampu mengubah kondisi.

Dalam proses komunikasi yang dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo masih memiliki beberapa faktor penghambat seperti

1. Penggunaan bahasa yang mengakibatkan ketidakpahaman dari pihak PKL untuk menerima informasi yang diberikan oleh pemerintah.
2. Perbedaan pemberian penafsiran baik komunikator maupun komunikan.
3. Masih adanya tekanan dari pihak pemerintah ketika adanya relokasi kawasan alun-alun Purwoejo.
4. Perbedaan status antara pemerintah dengan pihak PKL

5. Ketidaksediaan seseorang baik dari PKL dan pemerintah yang tidak memberikan informasi dan menerima informasi

4.2 SARAN

Dilihat dari permasalahan yang muncul ketika relokasi PKL, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah daerah
 - a. Dalam membuat kebijakan, Pemerintah diharapkan mampu melihat dari segi dampaknya, dalam hal ini pemerintah seharusnya konsisten terhadap kebijakan yang telah dibuat terkait dengan relokasi PKL. Ketika adanya perubahan desain dari masterplan seharusnya memberikan informasi dahulu melalui musrebang.
 - b. Pemerintah mampu melakukan promosi kepada masyarakat lokal maupun luar terkait dengan relokasi PKL alun- alun Purworejo ke Romansa Kuliner. Dengan hal tersebut masyarakat lokal maupun luar mengetahui relokasi PKL dan perekonomian PKL Romansa tetap terjaga dan meningkat.
2. Kepada Tim khusus pengelola PKL
 - a. Perlunya melihat kelangsungan hidup PKL dengan tetap membina PKL pasca relokasi eks alun-alun malam Purworejo sehingga PKL tetap terpantau dari segi ekonominya

- b. Melakukan proses komunikasi sebaiknya dilakukan dengan memahami situasi/ kondisi dahulu. Dengan melihat situasi dan kondisi maka penolakan yang dilakukan oleh PKL mampu di minimalisir bahkan dihilangkan.
 - c. Memberikan jangka waktu yang panjang ketika melakukan pemberitahuan atas relokasi sehingga pihak PKL dapat mengetahui informasi relokasi.
3. Kepada PKL

Mau memberikan informasi terkait dengan kondisi PKL, sehingga pemerintah juga memahami kondisi yang ada. Selain itu juga mau menerima informasi terlebih dahulu terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan saling *sharing* lewat musrebang maka tidak adanya *miscommunication* atau salah penafsiran antara PKL, pemerintah dan masyarakat.